

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan ialah permasalahan kemanusiaan sehingga, memunculkan pertanggungjawaban moral untuk seluruh masyarakat guna melindungi kehidupan mereka yang hidup pada kemiskinan. Menurut Tammie O'neil, kemiskinan memiliki kaitan erat dengan pelanggaran HAM. Dia mengatakan “...*human rights become a constitutive element of development and human rights violations become both a cause and symptom of poverty*” (Tammie O'Nei, 2006, hlm. 7). Yang artinya HAM (Hak Asasi Manusia) menjadi unsur konstitutif pembangunan dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi penyebab sekaligus gejala kemiskinan. Dengan kata lain, kemiskinan dapat muncul karena adanya pelanggaran HAM. Dari sudut pandang ini, besarnya masalah kemiskinan tidak dapat dipahami dari statistik saja. Karena seberapapun kecil statistiknya, kemiskinan menjadi sebuah indikasi adanya pelanggaran HAM di dalam masyarakat.

Definisi berdasarkan Hall dan Midgley (2004) bahwa kemiskinan ialah keadaan kekurangan material serta sosial yang mengakibatkan seorang berada di bawah kelayakan standar hidup ataupun seorang individu dibandingkan dengan pribadi lain dalam masyarakat didefinisikan sebagai berada pada kerugian yang relatif ekonomis karena Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kurangnya sumber

daya untuk memenuhi kebutuhan penghidupan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Munculnya fenomena ini diikuti dengan munculnya banyak organisasi sosial yang juga menangani fenomena kemiskinan, seperti LSM, yayasan dan forum sipil. Berkembangnya organisasi kemasyarakatan seringkali dipandang sebagai indikasi tumbuhnya kehidupan demokrasi. Organisasi masyarakat yang berkembang memiliki banyak bentuk. Dengan kata lain, informal, formal, dan nasional. Pola ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktis bagi mereka yang ingin mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Kemiskinan di negara berkembang merupakan masalah yang sangat kompleks untuk dipecahkan. Sebagian besar negara-negara berkembang seperti Malaysia dan Brunei Darussalam telah mampu memajukan pembangunan ekonomi melalui tingkatan produksi serta pertumbuhan tinggi pemasukan nasional, tetapi di satu waktu yang sama ketimpangan kekayaan semakin melebar. Masalah

kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan perlu ditangani secara terkoordinasi oleh semua pihak yang terlibat.

Gambar 1. 1 SDGs



17 tujuan dari Sustainable Development Goals, Pada tujuan pertama adalah: “No Poverty” atau Tidak ada kemiskinan, tetapi kemiskinan merupakan fenomena sepanjang sejarah manusia. Indonesia adalah negara yang dikaruniai sumber daya alam, akan tetapi masih menjadi negara yang tidak dapat dipisahkan dari masalah kemiskinan. Tujuan yang jelas dari SDGs adalah untuk mengakhiri kemiskinan, minimalisir ketidakadilan pada serta antar negara, peningkatan pengelolaan air serta energi, serta penentuan segera tindakan dalam menanggulangi berubahnya iklim. Beda halnya dengan MDGs, SDGs memfokuskan dalam upaya memerangi kemiskinan sama-sama diprioritaskan di samping inisiatif strategis untuk kemajuan ekonomi. Kebijakan sosial juga diterapkan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kesempatan kerja. Kebijakan juga diadopsi untuk mempromosikan dan

mempertahankan agenda ini guna menanggulangi perubahan iklim serta melindungi lingkungan.

Angka kemiskinan Indonesia telah berkembang menjadi masalah sistemik, dengan akar yang mengakar. Meskipun demikian, pemerintah telah gagal



menerapkan langkah-langkah berkelanjutan untuk memberantas kesulitan ini.

Untuk mengatasi kemiskinan tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih komprehensif, sistematis dan nontransisi untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia secara bertahap.

Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) tidak hanya menjadi kewajiban global bagi Indonesia, tetapi juga menjadi pedoman untuk menjadi negara maju, dan dukungan yang sejalan dengan tujuan nasional dalam berkontribusi langsung maupun tidak langsung untuk mencapai SDGs.

Bagi Indonesia, kemiskinan masih menjadi beban yang terus bertambah, terutama terkait dengan semakin lebarnya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

Sebagai anggota PBB, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan deklarasi SDGs. Artinya, Indonesia juga harus mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Deklarasi PBB. Selain menjadi komitmen Indonesia sebagai bagian dari komunitas global, pemberantasan kemiskinan juga menjadi komitmen konstitusional negara terhadap rakyatnya. Menurut pasal 34 UUD 1945, yang menerangkan bahwa kerja keras rakyat Indonesia yaitu untuk menciptakan kesejahteraan sosial seluruh rakyat Indonesia. Tujuan Pasal 34 UUD 1945 yakni “negara melindungi sepenuhnya rakyat miskin di Indonesia”. Perihal berikut pula searah dengan pembukaan UUD 1945 yang mengungkapkan bahwasanya Negara melindungi seluruh warga negara Indonesia dari segala bentuk kekerasan, termasuk penduduknya yang kurang mampu.

Selama bertahun-tahun, pengentasan kemiskinan di Indonesia telah menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Upaya mereka telah terintegrasi, dan langkah signifikan telah dilakukan sejak tahun 1995 dengan diperkenalkannya Peraturan Desa Tertinggal. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 ini semakin mempertegas komitmen tersebut dengan membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai oleh Wakil Presiden. Namun, terlepas dari inisiatif ini, kemiskinan tetap menjadi masalah mendesak di negara ini.

TNP2K sendiri dibentuk melalui dasar hukum PERPRES no. 15 tahun 2010, pasal 6 ayat 2 "Untuk melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan

dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan" dan diganti dengan Perpres no.96 tahun 2015 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. TKPKD berdiri di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota melalui PERPRES NO. 15 tahun 2010, pasal 15 "Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKPKD".

Provinsi Riau jadi satu-satu provinsi menjadi yang pertama, telah terbukti berkomitmen dalam mencapai Tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan ataupun Sustainable Development Goals (TPB ataupun SDGs). Bersumber pada perihal itu, Riau menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) terkait SDGs 2017-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2018 bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2018, yang termasuk publikasi pertama RAD SDGs di Indonesia. RAD SDGs masuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Riau, di mana pemerintah Riau melibatkan kabupaten/kota dan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pelaksanaannya (R. Ahmadrahim, 2018).

Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs merupakan program penurunan angka kemiskinan secara cepat dengan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Riau. Program ini bertujuan untuk secara cepat mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial di wilayah tersebut. Kedua, menciptakan peluang bagi masyarakat miskin untuk mengakses ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Komitmen terhadap implementasi penuh SDGs di Riau pada tingkatan provinsi serta kabupaten/ kota, konsisten dengan realisasi visi pembangunan daerah. Implementasi lokal serta upaya untuk meraih SDG didokumentasikan dengan cakup dalam arsip RAD. Arsip RAD disusun bersama oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dan menyertakan segenap pemangku kepentingan pembangunan yakni organisasi masyarakat, kalangan dunia usaha, akademisi, pemangku kepentingan otoritas lainnya.

Hasil RAD SDGs pertama 2017-2019 dari Riau, rencana dan anggaran pembangunan konsisten dengan tujuan SDGs. Kedua, kemiskinan, pendidikan berkualitas dan hidup sehat serta sejahtera adalah prioritas utama SDGs Riau. Lalu yang ketiga, perkembangan ekonomi, pengangguran terbuka, kesenjangan, perumahan layak, pengelolaan sanitasi serta permukiman kumuh, manajemen lingkungan, pendidikan dasar serta menengah dan manufaktur, ekonomi pertanian serta perkebunan, dan lain- lain. Keempat, untuk mencapai tujuan SDGs menuju tahun 2030, RPJMD 2019-2024 memuat berbagai proyek pembangunan yang direncanakan dengan anggaran relatif sesuai indikator dasar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)(R Ahmadrahim, 2018)

Dengan adanya RAD SDGs, sinkronisasi antara program penanggulangan kemiskinan dalam RAD SDGs khususnya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta tim pelaksana dan kelompok kerja (Pokja) yang membidangi penanggulangan kemiskinan yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (TKPKD) dan OPD terkait harus sejalan dengan program yang direncanakan.

TKPKD menangani pengentasan kemiskinan dan telah mengembangkan strategi untuk memprioritaskan kewajibannya. Mengkoordinasikan Penanggulangan kemiskinan dan memantau pelaksanaan penanggulangan kemiskinan menjadi tugas TKPKD provinsi yang bekerjasama dengan OPD terkait dalam mengkoordinasi penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan SKPD provinsi sebagai fondasi pembentukan RPJMD bidang kemiskinan serta koordinasi forum SPKD melalui penanggulangan kemiskinan dalam pembentukan Renja serta RENSTRA SKPD dan asesmen penerapan pembentukan arsip agenda pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan. Pengawasan TKPKD dimaksudkan guna mengatur pengamatan serta penelusuran pencapaian tujuan program ataupun aktivitas supaya cocok dengan kebijakan pembangunan daerah, mengendalikan program penanggulangan kemiskinan yang mencakup pencapaian tujuan, keahlian memanfaatkan anggaran serta hambatan yang dialami dan digabungkan sebagai hasil kontrol penerapan program penanggulangan kemiskinan secara periodik.

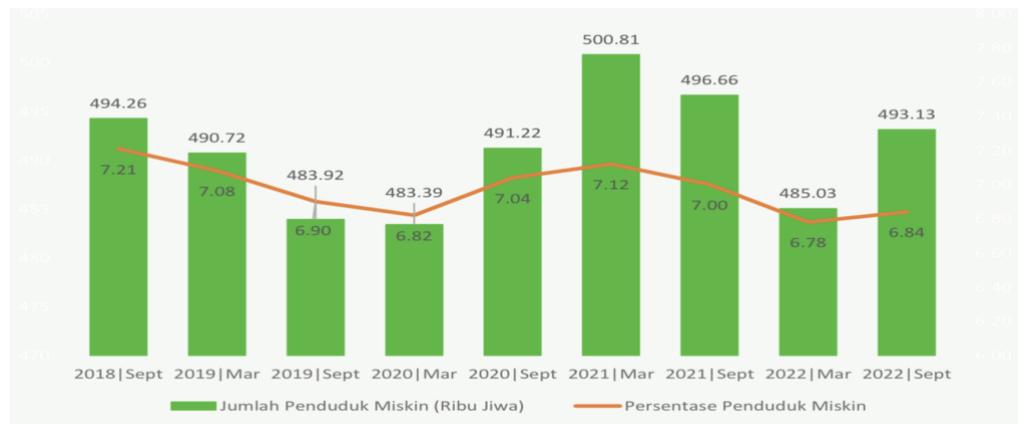
Dalam konteks ini, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan berusaha mengimplementasikan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Riau mencakup beberapa poin utama, antara lain

menghapus kemiskinan, kelaparan, kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan berkualitas. Poin-poin tersebut merupakan perspektif terpenting untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia di Riau. Implementasi poin-poin tersebut akan dilakukan oleh TKPKD yang bekerjasama dengan seluruh kelompok kepentingan di Riau. Tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dicapai dengan bantuan strategi TKPKD mengejar untuk memenuhi misinya.

Di Provinsi Riau, angka kemiskinan secara umum berfluktuasi antara

Gambar 1. 3 Kemiskinan di Riau

Sumber BPS



September 2018 dan September 2022, baik secara jumlah maupun persentase. Jumlah dan persentase orang miskin menurun dari September 2018 hingga Maret 2020. Namun demikian, jumlah dan persentase orang miskin meningkat per September 2020. Jumlah orang miskin meningkat paling drastis pada Maret 2021. Lonjakan ini disebabkan oleh wabah Covid-19 yang melanda Indonesia dan memperburuk situasi ekonomi negara yang sudah genting. Kemudian pada

September 2022 naik lagi. Gambar 1.3 memperlihatkan tingkat kemiskinan dari September 2018 hingga September 2022.

Tentu saja, kemiskinan masih menjadi permasalahan yang wajib ditanggulangi bersama dari berbagai pihak pemerintah, sektor swasta dan masyarakat memiliki tanggungjawab moral untuk bekerja sama menanggulangi kemiskinan sehingga mampu meraih tujuan-tujuan SDGs. Berdasarkan permasalahan yang sudah saya uraikan diatas, saya melakukan penelitian dengan judul, “Strategi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Riau untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals: No Poverty (SDGs-1)”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Akar permasalahan, sebagaimana disimpulkan dari konteks di atas, nampaknya adalah bagaimana Strategi Tim Koordinasi Kemiskinan (TKPK) Provinsi Riau dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait pengentasan kemiskinan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan daripada penelitian berikut, dalam kaitannya dengan perumusan topik yang akan diteliti, adalah Untuk mengetahui bagaimana Strategi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Riau telah memberikan dampak pada penanggulangan kemiskinan dalam mengimplementasikan *Sustainable Development Goals: No Poverty (SDGs-1)*?

## 1.4 Manfaat Penelitian

Pada suatu penelitian harus memiliki manfaat yang dapat digunakan kedepannya. Berkenaan kebermanfaatannya dari pengamatan penelitian berikut yakni:

### a. Manfaat Teoritis

Diharapkan pembaca akan memiliki pemahaman yang lebih baik dengan membaca penjelasan dari permasalahan tersebut di atas mengenai Strategi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau Untuk Mewujudkan *Sustainable Development Goals: No Poverty* (SDGs-1).

### b. Manfaat Praktis

Harapannya menjadi bahan literatur bagi seluruh lapisan masyarakat, terkhusus bagi mereka yang ingin mendalami masalah sosial-ekonomi-politik, dan sebagai sumber pengetahuan mengenai Strategi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Untuk mengimplementasikan *Sustainable Development Goals: No Poverty* (SDGs-1).

## 1.5 Fokus Penelitian

Untuk membantu penelitian ini, peneliti akan berkonsentrasi pada studinya mengingat latar belakang subjek penelitian yang disebutkan di atas pada **Strategi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Riau Periode 2022 dalam Menanggulangi Kemiskinan Untuk Mewujudkan *Sustainable Development Goals: No Poverty* (SDGs-1).**

## 1.6 Tinjauan Pustaka

Di dalam penelitian ini penulis akan membedah 4 temuan terkait dengan tema penelitian yang membahas mengenai ***“Strategi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Riau Untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals: No Poverty (SDGs-1)”***. Dalam penelitian ini, penulis mengkaitkan dengan beberapa karya ilmiah terdahulu, sehingga dapat dibandingkan. Adapun karya ilmiah sebagai berikut:

Skripsi Ayu Oktaviani Musri, dengan judul [Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals \(Sdgs\) Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Mengurangi Kemiskinan tahun 2020](#). Dinas Sosial Kota Pekanbaru menerapkan program SDG sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan yang ingin dideskripsikan oleh penelitian ini. Strategi organisasi untuk pengentasan kemiskinan meliputi Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Non Tunai (BPNT). Sementara program-program ini telah dilaksanakan secara efektif, satu-satunya titik lemah adalah bantuan yang tidak tepat sasaran dari pemberi bantuan. <http://repository.uin-suska.ac.id/29301/1/BAB%201-4%2C6.pdf>

Jurnal dengan judul [Strategi Pengembangan Usaha Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan \(TKPK\) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals \(SDGs\) di Pekanbaru](#) karya Fadel M. Azhari tahun 2022. Penulis penelitian ini melakukan penelitian kualitatif. Temuan kajian strategi penanggulangan kemiskinan di Pekanbaru yang dikoordinasikan oleh TKPK dalam mengimplementasikan sasaran program pengembangan usaha untuk UMKM,

mengungkapkan bahwasanya strategi pengembangan yang TKPK usung tidak berlangsung dengan baik dikarenakan komitmen dalam melaksanakan program serta koordinasi antar OPD yang kurang terkoordinir.

Skripsi Fachrul Auza'I, berjudul [Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga \(Pmb-Rw\) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru tahun 2019](#). Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di perkotaan dengan objek studi Kota Pekanbaru. Fokus penelitian adalah implementasi Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK) berupa Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP), hasil penelitian ini adalah pelaksanaan program yang kurang efektif disebabkan kurangnya antusiasme masyarakat yang ikut serta pada kepengurusan program PMB-RW. Bahkan kurangnya dana dan sosialisasi menjadi kendala serta pelaksanaan yang tidak sesuai pada waktunya yang telah ditetapkan.

Jurnal [Sustainable Development Goals \(SDGs\) dan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta](#) karya Nanda Bhayu P. ,Eko Priyo Purnomo, Agustiyara tahun 2020. Temuan ini menghasilkan bahwa Provinsi DI Yogyakarta menjadi Povinsi termiskin di pulau jawa yang Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta telah mengambil berbagai langkah yang bertujuan untuk mencapai SDGs dan mengentaskan kemiskinan. RPJMD 2017-2022 menjabarkan program yang telah dijalankan dan hasilnya berdampak positif. Angka kemiskinan multidimensi telah menurun secara nyata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jurnal berjudul [Kemiskinan Multidimensi dalam Percepatan Pencapaian Sustainable Development Goals \(SDGs\) di Riau](#) karya Syapsan, Dahlan Tampubolon dan Sri Endang Kornita. Temuan ini menghasilkan identifikasi kemiskinan berdasarkan pendekatan kemiskinan multidimensi (MPA) menggunakan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Rasio partisipasi bersih pendidikan SMA dibawah tingkat nasional, prevalensi malnutrisi balita meningkat, peningkatan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Riau. Dan perspektif analisis tentang infrastruktur dasar yang dimiliki oleh masyarakat ada kecendrungan air minum yang layak menurun.

Penelitian dari jurnal [Evaluasi Millenium Development Goals \(MDGs\) dalam Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan menuju Sustainable Development Goals \(SDGs\) di Kota Medan](#) karya Safika Rosyidatul Arifah dan Irham Zaki. . Program Millennium Development Goals (MDGs) telah berakhir pada tahun 2015, komitmen Indonesia untuk mencapai MDGs dilakukan dengan menjadikan MDGs sebagai persiapan referensi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Untuk memeriksa pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) harus dievaluasi bagaimana kondisi pembangunan memperoleh di Medan melalui indikator Millienium Development Goals (MDGs) yang secara khusus mengurangi kemiskinan dan kelaparan (tujuan 1 MDGs) sehingga dapat direkomendasikan beberapa program pengukuran yang dapat mempengaruhi pencapaian penetapan target Sustainable Development Goals

(SDGs) di Medan. Teknik analisis data digunakan untuk mendekati pendekatan kuantitatif, tetapi dalam lingkup analisis deskriptif dengan menjelajahi data dalam bentuk tabel dan grafik. Hasilnya menunjukkan bahwa kondisi perolehan pembangunan di Medan melalui indikator Millienium Development Goals (MDGs) pada dasarnya telah berjalan dengan baik di mana dari tujuh indikator yang menyatakan mayoritas kegiatan telah tercapai.

Jurnal berjudul [Pengarusutamaan Sustainable Development Goals \(SDGSS\) Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Pagar Alam](#) karya Ricky Rahmatullah, Teguh Endaryanto, M. Irfan Affandi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan anggaran program pengentasan kemiskinan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kota Pagar Alam dengan persentase tingkat kemiskinan serta menentukan program prioritas pengentasan kemiskinan yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kota Pagar Alam terkait dengan pengarusutamaan pencapaian target SDGs tahun 2030. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan Korelasi Pearson dan Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan, anggaran program pengentasan kemiskinan memiliki pola hubungan signifikan dengan penurunan persentase tingkat kemiskinan pada penganggaran yang kolaboratif dan sinergis melalui APBD Kota Pagar Alam dikombinasikan dengan APBN. Berdasarkan penilaian prioritas dalam model AHP, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial menjadi peringkat pertama atau pilihan utama Pemerintah Kota Pagar Alam dalam kerangka pengentasan kemiskinan dengan pengarusutamaan SDGs.

Jurnal [Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau](#) karya Eko Handrian dan Hendry Andry. Penelitian ini merupakan studi literatur, Pendekatan Partisipatif dan inklusif adalah prinsip pelaksanaan SDGs dilaksanakan dalam setiap tahapan penyusunan rencana aksi daerah provinsi Riau. Integrasi RPJMD dan RAD Provinsi Riau menjadi fokus percepatan dalam pencapaian tujuan SDGs dengan mensinkronisasi kembali tujuan SDGs dengan tujuan RPJMD Riau. Adapun prioritas SDGs didasarkan pada seberapa besar permasalahan yang terdapat di daerah, agenda terkait SDGs mengacu kepada rencana nasional, pendekatan yang digunakan pada pemerintah daerah bahwa ide pembangunan adalah pendukung bagi prioritas pembangunan daerah sejalan dengan visi dan misi kepala daerah. selain itu sinkronisasi dan akselerasi pelaksanaan SDGs perlu dibangun kelembagaan mencakup struktur, mekanisme koordinasi dan komunikasi, sharing informasi, monitoring dan evaluasi.

Jurnal berjudul [Pengelolaan organisasi dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Kendari](#) karya Joko Tri Brata. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan bentuk pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan di Tingkat Kota Kendari. Metode penelitian adalah untuk menampilkan fenomena manajemen organisasi dengan mengacu pada tugas dan fungsi utama lapangan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian ini menggambarkan konsep manajemen organisasi dalam pemberantasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di kota Kendari dalam bentuk model tata kelola dengan membagi tugas kelompok kerja secara khusus menangani bidang Pengumpulan Data dan

Sistem Informasi; bidang pengembangan kemitraan dan bidang pengaduan publik. Untuk mengurangi masalah organisasi, dalam bentuk tim kontrol program yaitu; Pengendali Program Perlindungan dan Bantuan Sosial; Kontrol Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendali Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil. Hasil penelitian juga merekomendasikan perlunya desain ulang kelembagaan organisasi pengentasan kemiskinan terpadu, sehingga pengelolaan organisasi dalam pencegahan kemiskinan lebih efisien.

Jurnal berjudul [Analisis SWOT Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandung](#) yang di tulis oleh Eka Nurcahya dan Mohammad Benny Alexandri. Hasil dari penelitian ini adalah Bagaimanakah strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di Kota Bandung apabila dianalisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) agar mampu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah di Kota Bandung? Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah menyadari bahwa intinya bukan soal besar kecilnya tetapi bagaimana cara menanggulangi orang miskin adalah lebih penting. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan berbagai program, misalnya bidang pendidikan, pekerjaan, layanan perumahan, partisipasi masyarakat. Pemahaman masyarakat yang masih rendah mengenai hak mereka untuk memperoleh penghidupan yang layak. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) telah menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun Peraturan

Daerah (PERDA), aplikasinya perlu pengawasan dan disusun program yang lebih praktis.

Jurnal berjudul [Proses Integrasi Dan Implementasi Sustainable Development Goals \(SDGs\) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Riau](#)

karya Hasan Warso Syahputra. Pemerintah Provinsi Riau dianggap terdepan dalam persiapan dan perencanaan pelaksanaan SDGs di Indonesia. Namun, SDGs adalah kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diperkenalkan ke dalam perencanaan pembangunan Provinsi Riau, konsep SDGs dapat sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dan juga bisa menjadi sesuatu yang asing, kontradiktif atau bahkan menjadi beban dalam implementasinya di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses integrasi dan implementasi SDGs dalam pembangunan daerah, terutama pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau, juga mengungkapkan hambatan apa yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Riau. Ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan informasi dengan berbagai cara seperti pengamatan langsung, tinjauan dokumen, perekaman dan melalui wawancara langsung dengan informan terpilih dari Layanan Regional yang menangani pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau. Hasilnya menunjukkan bahwa ada 17 indikator di RPJMD Provinsi Riau yang sejalan dengan indikator SDGs, dan sebanyak 15 indikator SDGs yang dapat diproksi menjadi indikator RPJMD, sementara 217 indikator tidak ada di RPJMD dan perlu dikembangkan. Dalam RAD SDGs Provinsi Riau pada 2017-2019 4 target dan 26 indikator SDGs

kemiskinan telah ditetapkan yang didukung oleh berbagai program yang dilaksanakan oleh beberapa layanan terkait dan pihak non-pemerintah lainnya.

Dalam jurnal penelitian oleh Ishartono dan Santoso Tri Raharjo dengan judul [Sustainable Development Goals \(SDGs\) dan Pengentasan Kemiskinan](#) jika Isu kemiskinan tetap menjadi isu penting bagi negara-negara berkembang, demikian pula dengan Indonesia. Penanganan persoalan kemiskinan harus dimengerti dan dipahami sebagai persoalan dunia, sehingga harus ditangani dalam konteks global pula. Sehingga setiap program penanganan kemiskinan harus dipahami secara menyeluruh dan saling interdependen dengan beberapa program kegiatan lainnya. Dalam SDGs dinyatakan *no poverty* (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pengentasan kemiskinan akan sangat terkait dengan tujuan global lainnya yaitu, dunia tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan jender, air bersih dan sanitasi, energy bersih dan terjangkau; dan seterusnya hingga pentingnya kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Melihat dari penelitian sebelumnya, fokus utama terletak pada daerah yang diteliti mengenai masalah kemiskinan, program-program penanggulangan kemiskinan, mewujudkan SDGs dengan kegiatan di pemerintah dan analisis Strategi melalui SWOT yang meneliti kinerja dari instansi pemerintahan serta kebijakan yang diterapkan. Perbedaannya dalam penelitian ini, peneliti lebih

terfokus kepada strategi dari TKPK Provinsi Riau dalam menanggulangi kemiskinan.

## **1.7 Kerangka Pemikiran**

Frame of mind atau kerangka pemikiran adalah konseptualisasi berkenaan bagaimana suatu teori berinteraksi dengan banyak faktor yang sudah teridentifikasi dalam isu-isu pokok (Sekaran 1992). Selanjutnya menurut Polancik (2009), kerangka konseptual adalah diagram yang menguraikan alur logis penelitian. Kerangka pemikiran didasarkan pada rumusan masalah (pertanyaan penelitian) dan menyajikan seperangkat konsep ganda dan hubungan antara konsep-konsep tersebut.

Menurut peneliti, kerangka pemikiran merupakan gabungan dari beberapa konsep dan teori, yang dijabarkan secara rinci dalam alur pemikiran yang logis terkait dengan judul kajian, rumusan masalah dan tujuan kajian, yang kemudian menjadi kerangka kerja. konfirmasi untuk variabel independen dan dependen penelitian diharapkan. Dalam kajian Strategi TKPKD Provinsi Riau Dalam Penanggulangan Kemiskinan Untuk Mewujudkan SDGs-1, penulis memaparkan beberapa konsep dan teori, seperti strategi, kebijakan publik dan kemiskinan, yang harus menjadi dasar pemikiran untuk menjelaskan dan memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang ada. Beberapa konsep dan teori ini dijelaskan di bawah ini:

### **1.7.1 Strategi**

Strategi adalah metode komprehensif yang menggambarkan konsepsi, perencanaan, dan pelaksanaan operasi selama kerangka waktu yang telah

ditentukan. Koordinasi antar kelompok kerja, tujuan aspek pendukung yang sejalan dengan prinsip, ide implementasi yang logis, efektivitas finansial, dan strategi untuk mencapai tujuan dengan sukses adalah komponen strategi yang solid.

Strategi menguraikan tindakan luas yang ingin dicapai oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Meski tidak disebutkan secara terbuka, strategi berikut termasuk perencanaan besar serta vital di organisasi mana pun yang dilakukan dengan benar. Beberapa definisi strategi ditawarkan sehubungan dengan definisi berikut:

Strategi, seperti yang didefinisikan oleh Alfred Chandler, adalah memutuskan tujuan serta tindakan dan menentukan bagaimana mencapai tujuan tersebut.

Kenneth Andrew mendefinisikan strategi sebagai pola keseluruhan tujuan, sasaran, atau target yang mendasari kebijakan dan program organisasi. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penting untuk menentukan organisasi dan jenis organisasi yang ingin di pimpin.

Strategi Buzzel dan Gale memandu manajemen dalam membuat kebijakan dan keputusan penting yang memiliki bobot yang sangat besar untuk hasil keuangan. Karena keputusan ini menuntut sumber daya yang besar dan tidak mudah diganti, mereka membutuhkan pertimbangan yang matang.

Konichi Ohinea berpendapat bahwa strategi bisnis berfungsi sebagai keunggulan kompetitif, akibatnya, perencanaan hanya diperlukan jika bertujuan untuk mencapai posisi akhir yang efisien dapat menahan perusahaan saingan.

Akibatnya, strategi perusahaan melibatkan penyesuaian pada kekuatannya sehingga lebih menguntungkan dibandingkan dengan pesaing perusahaan.

Strategi yang didefinisikan oleh Griffin adalah sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi (*plan is a broad plan to reach the goals of the organization*). Strategi merupakan rencana komprehensif untuk mencapai goals organisasi. Pelaksanaan prosedur sosial serta administrasi yakni individu serta kelompok memuaskan keperluan serta kehendaknya dengan memproduksi serta menukar barang, jasa, dan nilai dengan orang lain hanyalah salah satu penggunaan strategi dalam bisnis.

Strategi merupakan landasan organisasi dan bagian-bagiannya untuk membangun tahapan ataupun tindakan yang menitikberatkan pada faktor internal serta eksternal untuk mencapai tujuan. Tujuan dan sasaran yang harus dicapai harus menjadi pertimbangan utama dalam menyusun strategi yang harus berkonsentrasi pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai saat mengembangkan rencana.. Selain itu, organisasi harus terlibat dengan masyarakat di mana strategi tersebut diterapkan, agar strategi tidak bertentangan dengan kondisi lingkungan yang ada. Strategi tersebut merupakan perpanjangan dari misi mereka untuk menciptakan jembatan ke lingkungan organisasi. Strategi harus mampu berevolusi untuk menghadapi isu-isu strategis di lingkungannya, sedangkan strategi harus mampu merespon keputusan politik yang dibuat oleh organisasi. Oleh karena itu, strategi memiliki rencana untuk mencapainya. Jadi strategi adalah cara nyata untuk mencapai suatu tujuan. (Supriatna, 2018:34-35).

Mengutip Supriatna, Marrus mencirikan strategi sebagai prosedur perencanaan tingkat atas, yang ditujukan untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi dengan mengembangkan peta jalan tindakan yang harus dilakukan. Oleh karenanya, definisi yang disebutkan oleh Marrus dapat disebut sebagai strategi untuk menentukan rencana yang akan dilaksanakan oleh para eksekutif paling senior. Strategi direncanakan sedemikian rupa agar perusahaan atau instansi dapat mencapai tujuannya. (Marrus, 2002:31).

Menurut Kotten dalam (Prof.Dr.J. Salusu, 2006 104-105) memedakan strategi menjadi 4 jenis. Jenis berikut:

1. Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*) Strategi organisasi mencakup penjabaran program atau kegiatan yang sejalan dengan visi dan misi lembaga pemerintah atau daerah. Hasil perspektif yang muncul dari pendekatan ini adalah visi dan misi itu sendiri.
2. Strategi Program (*Program Strategy*) Fokus strategi program ini terletak pada analisis implikasi strategis dari program tersebut. Pertimbangan penting adalah apakah strategi yang diterapkan oleh pemerintah atau lembaga lokal akan menghasilkan hasil yang positif bagi lembaga dan masyarakat, atau sebaliknya, memiliki konsekuensi negatif.
3. Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*) Pendekatan strategis untuk dukungan sumber daya melibatkan pemanfaatan semua sumber daya yang mungkin dari otoritas atau lembaga lokal. Komponen berikut dapat diekstrapolasi dari pendekatan ini:

a. Sarana dan Prasarana

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” adalah sarana dan prasarana yang mempermudah dan memperlancar proses kerja serta alih fungsi dalam lingkungan pemerintahan dan lembaga masyarakat.

b. Sumber Daya Manusia

Program dan kegiatan lembaga didorong oleh sumber daya manusia, yang merupakan aset tak berwujud yang penting untuk mencapai tujuannya.

c. Sumber Daya Finansial

Pendanaan merupakan salah satu aspek yang sangat mendorong dalam setiap aktivitas instansi. Fungsi tersebut tidak akan berjalan dengan bagus melainkan disupport oleh ketersediaan finansial instansi.

4. **Institusional Strategy (Strategi Kelembagaan)** Fokus daripada strategi institusional yakni penguatan dan pengembangan strategi lembaga dalam menghadapi permasalahan dan bagaimana memanfaatkan unsur kelembagaan berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

Strategi adalah faktor terpenting dalam meraih tujuan, dan kesuksesan usaha bergantung pada kemampuan perencanaan strategi. Strategi sangat bergantung pada tujuan, keadaan, dan lingkungan. Strategi adalah upaya keseluruhan yang mengarah pada rencana pemasaran terperinci untuk meraih tujuan.

### 1.7.2 Kebijakan Publik

Pandangan David Easton (Thoha 2002:62–63), kebijakan publik ialah penyebaran tujuan-tujuan yang diwajibkan atau legal di seluruh masyarakat. Kebijakan publik Easton adalah bagian mendasar dari masyarakat secara keseluruhan. Tetapi hanya pemerintah yang menghasilkan apa yang penting bagi masyarakat secara keseluruhan, dan apa yang dilakukan atau tidak dilakukannya yakni hasil daripada nilai-nilai kebijakan publik.

Menurut Carl Friedrich, kebijakan merupakan solusi yang diusulkan untuk hambatan dan peluang yang diajukan oleh individu, organisasi, atau badan pemerintah. Kebijakan ini dirancang untuk mencapai tujuan atau tujuan tertentu dan dapat diadaptasi dan diatasi untuk mencapai kesuksesan (Budi Winarno 2002:16).

Kebijakan publik yang dinyatakan Anderson (dalam Koryati et al. 2005:7) Ketertiban umum adalah pendekatan pembangunan yang dipimpin pemerintah yang menargetkan perbaikan kesalahan pelaksanaan dan keberhasilan penyelesaian kegiatan oleh otoritas. Pada dasarnya, ini adalah proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk memastikan tata kelola yang efisien dan efektif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan negara dan pembangunan yang berlangsung di suatu daerah. Sebagian besar penilaian ini dibuat dalam kehidupan ketatanegaraan melalui undang-undang dan peraturan yang berbeda.

Bagi Laswell dan Kaplan (dalam Islamy ,2004:17) mengkonseptualisasikan kebijakan publik sebagai program untuk mencapai

tujuan, nilai, serta tindakan yang teratur. Kebijakan publik, sebagaimana didefinisikan oleh Nugroho (2003:7), adalah hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dan harus dijunjung tinggi bagi seluruh warga negara.

Kebijakan publik memiliki ciri-ciri antara lain:

1. Tindakan seseorang, kelompok atau pemerintah.
2. Dilaksanakan dari seorang aktor.
3. Suatu hal yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah.
4. Kebijakan Publik termasuk wujud konkrit negara dengan rakyatnya.
5. Seperangkat petunjuk/peraturan, misalnya undang-undang.

Tujuan pembuatan atau pelaksanaan kebijakan publik adalah:

1. Menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
2. Perlindungan hak asasi manusia.
3. Menciptakan kedamaian dan keharmonisan pada masyarakat.
4. Mengimplementasikan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu bagi Eulau (dalam Jones 1985:47) Menurut pengertian populer, kebijakan adalah tekad yang bertahan lama yang ditandai dengan keteguhan dan keteraturan baik dalam pembentukan maupun pelaksanaannya oleh pembuat kebijakan dan penegak kebijakan. Kemudian bagi dia, sesuatu kebijakan bisa dibilang sebagai kebijakan publik ataupun tidak ditinjau dari unsur kebijakan publiknya (Jones: 1985: 48-49) yang melingkupi keadaan selanjutnya:

1. *Intentions*, maksud atau tujuan sebenarnya daripada kebijakan.
2. *Goal*, hasil yang diinginkan atau kondisi yang ingin dicapai.

3. *Plans of proposals*, yakni strategi khusus ataupun rencana dalam menggapai tujuan.
4. *Program*, yakni program yang kredibel dalam menggapai tujuan kebijakan.
5. *Decision or choices*, Pilihan atau keputusan, terutama yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan, membuat strategi, mengimplementasikan, serta evaluasi program.
6. *Effect* yaitu efek atau dampak yang bisa diukur.

Kebijakan publik dipengaruhi oleh interaksi variabel yang kompleks, termasuk struktur pemerintahan, norma budaya nasional dan lokal, kondisi sosial ekonomi, dan nilai politik hukum. Faktor-faktor tersebut selanjutnya dipengaruhi oleh mood masyarakat selama periode tertentu, sebagaimana dicatat oleh Kraft dan Furlong dalam Riant Nugroho (2015: 105).

Berikutnya menurut William N. Dunn (2003:95) mendeskripsikan kajian kebijakan sebagai sesuatu wujud kajian yang menciptakan serta menyuguhkan data sedemikian rupa maka memberikan dasar bagi pencipta kebijakan guna mengambil keputusan.

Pandangan AG. Subarsono (Dalam Harbani Pasolong 2011:41) menyatakan jika sistem kebijakan publik merupakan rangkaian aktivitas intelektual yang dilaksanakan dalam kerangka sistem politik. Aktivisme politik diawali dengan langkah- langkah berikut:

1. Setelah menetapkan agenda, pejabat yang dipilih dan diangkat memasukkan isu-isu ke dalam agenda publik. Pada fase ini, isu bersaing dahulu agar

dimasukkan pada agenda politik serta terakhir pada agenda pengambilan keputusan.

2. Setelah agenda politik ditetapkan, pembuat kebijakan terlibat dalam tugas penting perumusan kebijakan. Ini melibatkan identifikasi masalah, mengevaluasi berbagai opsi yang tersedia, dan menentukan solusi terbaik untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Tindakan yang dipilih didasarkan pada analisis yang cermat dan pertimbangan alternatif.
3. Pada akhirnya, setelah mempertimbangkan beberapa usulan kebijakan, satu alternatif dipilih dan diadopsi dengan dukungan mayoritas parlemen, persetujuan pimpinan lembaga, atau keputusan pengadilan.
4. Untuk mengatasi masalah di tingkat administrasi dan lembaga pemerintah yang lebih rendah, pilihan program dan kebijakan telah dianggap sebagai opsi yang layak untuk diterapkan.
5. Fase evaluasi kebijakan melibatkan penilaian efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut telah berhasil memberikan solusi. (Budi Winarno, 2008:33-34).

Edi Soeharto (2006:44), menyatakan bahwa dalam memahami berbagai definisi kebijakan publik, sebaiknya didiskusikan beberapa konsep kunci yang terkandung dalam kebijakan, antara lain:

1. Perundang-undangan yang disahkan oleh pemerintah. Badan pemerintah dengan kekuatan politik, hukum, dan keuangan yang diperlukan merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik.
2. Reaksi terhadap tantangan dan kebutuhan di dunia nyata. Ketika suatu kebutuhan atau isu muncul dalam suatu komunitas, kebijakan publik berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
3. Urutan langkah-langkah yang direncanakan dan dilaksanakan. Dalam banyak kasus, kebijakan publik bukanlah pilihan tunggal, melainkan kumpulan alternatif yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tertentu.
4. Memilih untuk bertindak atau tidak. Secara kolektif menangani masalah-masalah sosial adalah inti dari kebijakan publik.
5. Pembeneran oleh satu orang atau beberapa pelaku. Agar kebijakan publik menjadi efektif, itu harus merupakan rencana tindakan yang dipikirkan dengan matang, bukan hanya pernyataan keinginan yang tidak jelas.

Leo Agustinus (2014:8), menyatakan bahwa ada sebagian komponen yang tercantum pada kebijakan publik yaitu:

1. Kebijakan senantiasa memiliki maksud ataupun bertugas mengarah tujuan khusus.
2. Tindakan pemerintah menyusun kebijakan publik.
3. Apa sebenarnya yang dilakukan pemerintah adalah menetapkan kebijakan.

4. Kegiatan pemerintah yang mencoba untuk mengatasi masalah publik tertentu melalui kebijakan publik yang menguntungkan dan merugikan (keputusan oleh pimpinan yang berkuasa untuk tidak melakukan apa-apa).
5. Aturan dan regulasi yang memaksa adalah dasar dari semua kebijakan publik yang efektif (sewenang-wenang).

Berikut adalah variabel penentu kerangka kebijakn publik yang dipaparkan oleh Suharno (2010:31):

1. Tujuan yang diinginkan, termasuk kompleksitas tujuan yang mau dicapai. Efektivitas politik lebih sulit dicapai jika tujuan politiknya lebih rumit. Di sisi lain, jika tujuan politik lebih sederhana, tujuan itu akan lebih mudah dicapai.
2. Preferensi nilai apa yang harus diperhitungkan. Kebijakan yang melingkupi beraneka ragam tipe nilai jauh lebih sulit diraih dari kebijakan yang sebatas pengejaran suatu nilai.
3. Dibandingkan dengan sumber daya dukungan Kebijakan. Efektivitas sebuah kebijakan bakal ditentukan dari sumber daya keuangan, fisik serta prasarana yang lain.
4. Kapasitas pemangku kepentingan guna terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas pelaku politik yang terlibat dalam pembuatan kebijakan berdampak pada kualitas kebijakan yang dihasilkan. Pendidikan, keahlian yang dapat dipercaya, pengalaman profesional, dan integritas moral semuanya berkontribusi pada kualitas kebijakan.

5. Rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Efektivitas kebijakan dapat dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan saat mempraktekkannya. Teknik yang diadopsi adalah absolut atau demokratis, dan juga top-down atau bottom-up.

Kebijakan publik Bagi Hogerweft (Faried Ali:2012:15) merupakan upaya guna meraih tujuan tertentu dengan metode tertentu serta waktu tertentu. Teori ini menyubstitusi isi dari 4 komponen penting:

1. Faktor upaya dalam kebijakan berarti kalau kebijakan itu berupa komitmen yang dibuat, komitmen ini dapat berupa tindakan (behavior atau tingkah laku atau tindakan) dan dapat berupa pandangan semacam pernyataan ataupun pendapat.
2. Faktor tujuan menjadi berarti sebab dengan menjelaskan tujuan yang diungkapkan dengan dasar kesepakatan yang dibuat pemerintah, membedakannya dengan tujuan yang diupayakan sikap nonpemerintah. Dibandingkan dengan Faktor Sarana, banyak yang harus diperhatikan antara lain ukuran atau skala media dalam kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai.
3. Faktor waktu dipahami sebagai suatu kondisi yang berkaitan dengan periode waktu untuk meraih tujuan, pemanfaatan sarana serta aktivitas dalam usaha. Durasi dalam isi kebijakan senantiasa terikat dengan ketiga faktor yang lain dan senantiasa terikat dengan kecepatan pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan.

Berdasarkan pengertian kebijakan-kebijakan yang sudah dijabarkan di atas, bisa disimpulkan:

1. Pemerintah melaksanakan kebijakan publik, yang merupakan tugas pemerintah.
2. Kebijakan publik adalah hak untuk menerapkan ataupun tidak menerapkan suatu dengan tujuan khusus.
3. Kebijakan publik yang berpihak pada kemaslahatan masyarakat.

### **1.7.3 Kemiskinan**

Garis kemiskinan digambarkan ketika tingkat kehidupan seseorang berada di bawah median regional. Ketidakmampuan untuk membeli makanan, pakaian, dan tempat tinggal adalah ciri-ciri yang menentukan dari kemiskinan. Memiliki pendapatan rendah membuat lebih sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan serta pendidikan.

Deprivasi relatif terhadap kualitas hidup yang buruk berdampak langsung pada kesehatan, moralitas, dan harga diri, seperti yang dijelaskan oleh Suparlan (2014).

Ritonga (2003) mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan dimana orang atau keluarga tidak dapat memenuhi mereka dengan kebutuhan yang paling mendasar. Dalam konteks ini, kebutuhan dasar mengacu pada kebutuhan hidup yang mendasar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan interaksi sosial yang harus dimiliki setiap orang atau keluarga.

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakberuntungan yang parah, keterbelakangan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, pendidikan yang tidak memadai, kesehatan yang buruk karena ketidakmampuan untuk membayar perawatan kesehatan, status sosial yang rendah dan identik dengan orang yang belum menyiapkan uang untuk masa depan mereka. Secara fisik, kemiskinan dikaitkan dengan kehidupan di pedesaan, di tepi pantai, di tepi sungai yang keruh dan tercemar, serta di pemukiman kumuh. Bahkan kemiskinan membutakan orang, dan mereka terus melakukan prostitusi, pencurian, kecurangan, bunuh diri, dan banyak hal negatif lainnya yang mengikat mereka akibat kemiskinan.

Individu atau kelompok orang yang hidup dalam kemiskinan tidak memiliki hak-hak esensial yang diperlukan untuk mendapatkan, mempertahankan bahkan meningkatkan standar hidup yang layak. Kebutuhan dasar yang sering dikenal dengan hak asasi manusia meliputi kebutuhan akan tempat tinggal, akses terhadap air bersih, tanah bersih, sumber daya alam, suasana yang nyaman, dan kesempatan perwujudan kehidupan sosial dan politik.

Kemiskinan menurut Syani Abdul (2002:329) bahwa pada dasarnya salah satu masalah dalam kehidupan masyarakat, terutama di negara berkembang. Masalah kemiskinan memerlukan penyelesaian masalah secara terencana, terpadu dan komprehensif dalam jangka pendek. Usaha pengentasan kemiskinan merupakan usaha dalam percepatan proses pembangunan yang sedang berjalan.

Keadaan inividu tidak mampu mempertahankan dirinya sesuai dengan derajat kehidupan kelompoknya dan juga tidak mampu menggunakan daya hidup

kelompoknya serta tidak mampu menggunakan tenaga psikis atau fisiknya dalam kelompok itu. Ini adalah definisi dari kondisi yang dikenal sebagai kemiskinan. Mereka menentang kemiskinan karena mereka sadar bahwa mereka belum berhasil memperoleh lebih dari yang mereka punya sekarang dan karena mereka merasa bahwa dunia tidak adil bagi mereka. Bagi mereka, masalah yang paling signifikan terkait dengan kemiskinan adalah bahwa mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka; ini adalah penyebab utama meningkatnya orang kaya, pelacuran, dan praktik serupa lainnya. Dari segi sosiologis, persoalan ini muncul karena pranata sosial tidak berfungsi seefektif mungkin (Soerjono Soekanto, 2010:320).

Menurut pandangan Kiki (Husni Thamrin, 2009) memberikan definisi yang lebih mendalam tentang gagasan kemiskinan. Menurut Kiki, kemiskinan adalah keadaan di mana kebutuhan mendasar seseorang, seperti keberadaan, keterikatan, rasa aman, identitas, perlindungan, kreativitas, kebebasan, partisipasi, dan waktu luang, tidak terpenuhi.

Kemiskinan, menurut Widodo, merupakan antusiasme bangsa dan masalah yang sangat mendasar yang wajib diselesaikan adalah orang miskin, yang biasanya tidak berpenghasilan cukup atau tidak sama sekali. Sebagai konsekuensi dari kurangnya kemampuan kewirausahaan dan terbatasnya akses ke peluang ekonomi, kaum miskin tertinggal dari masyarakat lainnya.

Sudut pandang Effendi, aspek kemiskinan bisa dikuantifikiasi secara langsung dengan mengidentifikasi persediaan sumber daya alam yang ada pada golongan serta membandingkannya dengan ukuran standar. Kemiskinan menurut

konsep ini yaitu sekelompok orang berkaitan dengan keadaan keuangan dan persyaratan dasar yang serupa. Estimasi kebutuhan terbatas pada barang-barang paling penting yang diperlukan untuk bertahan hidup.

Menurut sudut pandang sebelumnya, istilah miskin mengacu pada keadaan yang dicirikan sebagai kurangnya permintaan untuk memenuhi kebutuhan dasar keberadaan, di mana seseorang menderita kecemasan, penderitaan, atau kekurangan sumber daya pada setiap tahap kehidupannya. Kebutuhan dasar dapat diterjemahkan ke dalam seperangkat barang dan jasa yang diperlukan manusia untuk hidup secara layak.

Sejumlah ciri signifikan masuk dalam kategori aspek kemiskinan yang pertama adalah aspek politik, yaitu kurangnya akses pengambilan keputusan mengenai kehidupan mereka. Kedua, aspek sosial, yang dikecualikan dari lembaga-lembaga utama masyarakat saat ini. Aspek ketiga yaitu ekonomi, adalah rendahnya pendapatan dan minimnya kepemilikan aset lingkungan seperti air bersih dan listrik merupakan akibat langsung dari kualitas sumber daya manusia yang buruk, yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan keterampilan terkait lainnya. Keempat merupakan aspek budaya atau nilai yang terjebak dalam budaya kualitas SDM yang buruk, seperti semangat kerja yang buruk, berpikir pendek, dan mudah putus asa.

Kebijakan ekonomi dan politik yang tidak menguntungkan bagi keluarga miskin merupakan penyumbang utama masalah kemiskinan di Indonesia. Kebijakan ini mempersulit rumah tangga berpendapatan rendah untuk memiliki

akses keuangan dan aset lain yang mereka perlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Menurut Ali Khomsan dkk (2015: 3-4) oleh Chambers, empat faktor lain yang menjadi penyebab kemiskinan adalah:

- a. Kemiskinan Absolut. Pendapatan berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup membayar kebutuhan dasar termasuk tempat tinggal, pakaian, makanan, perawatan kesehatan, dan pendidikan untuk bertahan hidup dan bekerja
- b. Kemiskinan relatif, ketika seseorang hidup di atas garis kemiskinan namun di bawah rata-rata masyarakat akibat inisiatif pembangunan yang belum menjangkau semua sektor masyarakat, menimbulkan kesenjangan ekonomi.
- c. Kemiskinan kultural, persoalan sikap individu atau kelompok masyarakat karena unsur-unsur budaya, seperti tidak ingin memperbaiki taraf hidup, lamban, boros, dan tidak kreatif, sekalipun dengan dukungan orang lain.
- d. Kemiskinan struktural, situasi kemiskinan diakibatkan akses sumber daya terbatas di sistem sosio-politik yang tidak membantu.

Semua masalah muncul karena faktor penyerta yang menyebabkannya dan masalah kemiskinan yang dihadapi bangsa Indonesia. Faktor yang mengakibatkan kemiskinan: Kurangnya pendidikan, kemalasan, keterbatasan sumber daya alam, keterbatasan kesempatan kerja, dan keterbatasan modal(Hudyana, 2009).

Hartomo dan Aziz (2001:191) Ketika masyarakat tumbuh dan berkembang, nilai dan norma sosial baru cenderung bertemu dan dapat

menyebabkan perubahan standar hidup tertentu, yang kemudian menjadi norma sosial. Besar kecilnya kaya atau miskin dapat diukur dari kekayaan dan tingkat nilai ekonomi. Faktor ekonomi kemudian digunakan sebagai acuan dalam menilai tingkat kemiskinan. Buktinya, sebagian besar masyarakat membela faktor-faktor tersebut.

Emil Salim (dalam Hartomo dan Aziz 2001: 191) menyimpulkan bahwa tindakan aktif dan campur tangan pemerintah diperlukan untuk memperbaiki keadaan mereka untuk mengangkat mereka dari kemiskinan. Tanpa dukungan pemerintah, mereka tidak dapat menerima bagian yang lebih adil dari pendapatan nasional.

Karl Marx, seorang filsuf kontemporer dari Barat, pada mulanya mengemukakan gagasan tentang kemiskinan struktural. Kemiskinan yang diciptakan oleh politisi struktural adalah kemiskinan struktural. Gagasan ini berpendapat bahwa kemiskinan itu mungkin karena pada dasarnya diciptakan. Sumber utama kemiskinan di bawah sistem ini bukanlah kurangnya akses ke kebutuhan dasar, melainkan ketidakmampuan orang biasa untuk memenuhi kebutuhan.

#### **1.7.4 *Sustainable Development Goals (SDGs)***

Hampir setiap negara di dunia, termasuk Indonesia, telah mendaftar dan mulai bekerja untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Keberhasilan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat diukur sebagian dengan sejauh mana

hasil yang diinginkan telah diwujudkan melalui inisiatif implementasi kesepakatan bersama yang berbeda yang telah dilakukan.

Diawali dengan pertemuan tanggal 25-27 September 2015 di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, era SDGs resmi dimulai, menyusul berakhirnya era MDGs berhasil mengurangi populasi miskin dunia hingga setengahnya. Perwakilan dari 193 negara menghadiri upacara untuk secara resmi meratifikasi teks SDGs (Sustainable Development Goals). Acara ini merupakan tindak lanjut dari acara penandatanganan dokumen SDGs yang berlangsung tanggal 2 Agustus 2015 juga di New York. Secara aklamasi, 193 negara anggota PBB menyetujui teks dengan judul *"Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development"* pada saat itu. Dokumen SDGs juga disusun sebagai sarana untuk memastikan bahwa pencapaian MDGs terus berkembang di tahun mendatang.

Untuk mengatasi masalah ini, masyarakat internasional telah mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sebuah program kerja, SDGs diimplementasikan mulai tahun 2015 dengan harapan ketujuh belas tujuan akan selesai pada tahun 2030. Masing-masing dari tujuh belas tujuan dimaksudkan untuk membantu dunia secara keseluruhan, dan semuanya tampak saling berhubungan dan bekerja menuju akhir yang sama. Selanjutnya, tujuan pembangunan global yang berkelanjutan menyediakan pengaturan yang luas dan multidisiplin. Singkatnya, SDGs, sebagaimana dinyatakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (2019) di situs webnya:

*“...At its heart are the 17 Sustainable Development Goals (SDGs), which are an urgent call for action by all countries-developed and developing-in a global partnership. They recognize that ending poverty and other deprivations must go hand-in-hand with strategies that improve health and education, reduce inequality, and spur economic growth-all while tackling climate change and working to preserve our oceans and forests...”*

Dilihat dari tujuan yang hendak dicapai oleh SDGs sebagaimana diuraikan di atas, pasti ada masalah yang perlu mendapat perhatian prioritas, seperti kemiskinan. Sangat jelas bahwa ini bukan masalahnya, meskipun pernyataan tersebut menyiratkan bahwa kemiskinan telah dihilangkan sebagai hasil dari kapasitas SDG untuk mencapainya melalui proses pembangunan global. Perserikatan Bangsa-Bangsa menganggap kemiskinan sebagai masalah mendesak di dunia sekarang, dan penilaian ini berlaku terlepas dari kriteria yang digunakan untuk menargetkan tujuh belas tujuan berbagai program.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah upaya untuk mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan dengan pembangunan yang berkeadilan dan tidak merugikan siapa pun, termasuk lingkungan atau manusia. Menurut Marten (2001:1), bidang studi yang dikenal dengan ekologi memungkinkan untuk mengkaji hubungan yang terjalin antara manusia dan lingkungan sekitarnya. Menurutnya, ekosistem terdiri dari banyak jenis spesies yang dapat ditemukan di suatu lingkungan, termasuk manusia, tumbuhan, hewan, dan organisme abiotik. Di dunia kita, ekosistem tidak ada dalam ruang hampa dan tidak mengelola sistemnya sendiri secara mandiri. Selain ekosistem, terdapat sistem sosial yang berperan sebagai *check and balance* atas berfungsinya ekosistem.

Variabel kerja dan tindakan manusia sebagai makhluk hidup merupakan inti dari definisi sistem sosial menurut Marten (2001: 3). Ekosistem dapat mengalami perubahan dalam bentuk energi dan material serta informasi sebagai akibat dari faktor-faktor seperti perkembangan teknologi, pertumbuhan populasi, sistem nilai, struktur sosial, dan akumulasi pengetahuan. Dalam pernyataan selanjutnya, dia menyebut topik ini sebagai "ekologi manusia". Bila ditelaah secara rinci isu-isu pembangunan yang melatarbelakangi munculnya program SDGs, beberapa isu yang muncul antara lain keterkaitan sistem sosial dengan ekosistem, khususnya dalam hal kemiskinan, yang punya akibat fatal bagi kerusakan yang dilakukan terhadap lingkungan. Karenanya, studi lebih lanjut tentang interkoneksi dalam tantangan SDGs, khususnya masalah kemiskinan SDGs, sangat diperlukan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sendiri dikonseptualisasikan selama Konferensi PBB mengenai Pembangunan Berkelanjutan yang diadakan di Rio de Janeiro tahun 2012. Tujuan konferensi tersebut yakni menetapkan arah tindakan menuju pencapaian tujuan bersama secara global yang mampu menjaga keseimbangan antara tiga pilar pembangunan berkelanjutan. SDGs punya lima landasan utama yang bertujuan menggapai tiga tujuan mulia pada tahun 2030 yang menyelesaikan kemiskinan, menggapai kesetaraan, serta menanggulangi perubahan iklim. Fondasi ini adalah manusia, planet, kemakmuran, kedamaian, dan kemitraan. Untuk menjaga keseimbangan ketiga dimensi pembangunan, SDGs punya lima landasan utama. Terlepas dari dua keberhasilan ini, kemiskinan terus

menjadi masalah yang signifikan dan kritis di seluruh dunia. Berikut 17 tujuan yang telah digariskan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tiga cita-cita yang mengagumkan tersebut.

Ke-17 Tujuan Global SDGs itu yakni:

1. *No Poverty*. Penghapusan Kemiskinan. Tidak ada jenis kemiskinan yang dapat ditemukan di wilayah mana pun di planet ini.
2. *Zero Hunger*. Mengakhiri kelaparan, menyediakan ketahanan pangan, menaikkan nutrisi, serta mendorong terwujudnya praktik pertanian berkelanjutan.
3. *Good Health and Well-being*. Keadaan kesehatan yang baik serta kesejahteraan umum Menjamin kehidupan sehat untuk setiap orang di segala usia dan mendorong kesejahteraan mereka secara keseluruhan adalah tujuan yang penting.
4. *Quality Education*. Pendidikan dengan Kualitas Baik Memastikan bahwa setiap orang punya akses ke pendidikan berkualitas tinggi serta lebih banyak kesempatan belajar, serta memastikan bahwa pendidikan bersifat inklusif serta egaliter, dan mendorong kesempatan untuk tiap orang untuk terus belajar sepanjang hidup mereka.
5. *Gender Equality*. Mengupayakan kesetaraan gender serta memanfaatkan secara efektif populasi wanita di dunia.

6. *Clean Water and Sanitation*. Akses Air Minum serta Sanitasi Bersih  
Memastikan bahwa setiap orang memiliki akses air bersih dan sanitasi yang dapat dipertahankan sepanjang waktu.
7. *Affordable and Clean Energy*. Energi yang bersih serta terjangkau.  
Memastikan bahwa setiap orang dapat memperoleh sumber energi terjangkau, bisa diandalkan, ramah lingkungan, serta mutakhir.
8. *Decent Work and Economic Growth*. Pertumbuhan Ekonomi dan Lapangan Kerja yang Dapat Diterima mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif serta berkelanjutan, serta lapangan kerja penuh serta produktif dan layak untuk seluruh orang.
9. *Industry, Innovation and Infrastructur*. Perdagangan, Kemajuan Teknologi, dan Infrastruktur Fisik Membangun infrastruktur dengan kualitas tinggi, mendukung perubahan industri inklusif serta berkelanjutan, dan mendorong inovasi adalah tujuan penting.
10. *Reduce Inequalities*. Menutup Kesenjangan Pencapaian yang berdampak pada berkurangnya ketimpangan di sebuah negara ataupun lintas negara dalam skala global.
11. *Sustainable Cities and Communities*. Kelangsungan Jangka Panjang Kota serta Masyarakat. Menciptakan kota serta komunitas beragam populasinya, berkualitas tinggi dan aman, serta tangguh dan berkelanjutan sepanjang waktu.

12. *Responsible Consumption and Production*. Konsumsi serta Tanggung Jawab Pihak Bertanggung Jawab. Memastikan bahwa pola konsumsi dan produksi saat ini terus berlanjut tanpa gangguan.
13. *Climate Action*. Mengambil Tindakan Terkait Iklim Tindakan cepat diperlukan untuk mengatasi perubahan iklim serta efek yang dimunculkan.
14. *Life Below Water*. Kehidupan Bawah Laut. Melindungi dan mempertahankan kelangsungan jangka panjang laut dan bentuk kehidupannya sangat penting untuk pengembangan praktik berkelanjutan.
15. *Life on Land*. Keberadaan di Bumi. Melindungi, memulihkan degradasi tanah, serta melindungi keanekaragaman hayati, memulihkan, serta menaikkan penggunaan ekosistem terestrial secara berkelanjutan. Mengurangi tanah gersang dan mengganti tanah hijau. melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan eksosistem daratan dan mengelola hutan secara lestari.
16. *Peace, Justice and Strong Institutions*. Lembaga Peradilan Tangguh serta Pemeliharaan Perdamaian Membangun lembaga efektif, akuntabel, serta inklusif di seluruh level, mendorong perdamaian masyarakat bagi pembangunan berkelanjutan, memberi akses keadilan untuk seluruh orang, serta akuntabel bagi semua kelompok. Semua hal ini harus dilakukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

17. *Partnership For The Goals*. Upaya Kolaboratif menggapai Tujuan. Implementasi harus diperkuat, serta kemitraan global bagi pembangunan berkelanjutan harus direvitalisasi.

SDGs lebih baik dari MDGs karena 7 alasan, yakni:

1. Lebih banyak orang dari seluruh dunia bekerja sama dalam program SDGs. Negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan organisasi internasional lainnya menghasilkan MDGs. Sementara perincian SDGs digarap dalam pembicaraan internasional yang mencakup negara berpenghasilan menengah serta berpenghasilan rendah.
2. Sekarang, sektor swasta memainkan peran sama dalam versi yang lebih besar.
3. Tidak ada standar HAM dalam MDGs. Masyarakat menilai MDGs tidak memberikan nilai keadilan yang seharusnya berupa pelanggaran HAM. Hal ini menyebabkan banyak orang terjebak kemiskinan. Sedangkan SDGs dinilai sejalan prinsip serta HAM lebih baik.
4. SDGs yakni program untuk semua orang. Tujuh dari tujuan SDGs fokus untuk membantu ketimpangan sosial, dan enam tujuan lainnya adalah situasi darurat. Ada tujuh tujuan yang berlaku untuk semua orang, dan dua tujuan yang mencoba menghentikan diskriminasi.
5. Indikator memberi kesempatan keterlibatan kepada masyarakat sipil.
6. SDGs dianggap dapat memberikan inspirasi kepada negara-negara di seluruh dunia.

7. Pada Konferensi Para Pihak ke-21 (COP21) di Paris, dibuat kesepakatan global tentang perubahan iklim. Kesepakatan ini merupakan kerangka kerja transisi menuju ekonomi rendah karbon dan masyarakat yang tangguh terhadap perubahan iklim.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah inisiatif untuk meningkatkan pembangunan dengan manusia sebagai pusatnya. Tujuan menyeluruh program ini adalah memastikan seluruh orang punya sumber daya yang mereka butuhkan bagi hidup sehat, hidup produktif, bebas dari berpendapat, dan percaya diri sebagai individu.

Upaya pengarusutamaan untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan, serta menangani elemen kemiskinan yang lebih luas dan terkait, merupakan fokus utama SDGs. Semua penduduk, baik pria ataupun wanita, wajib mendapat kesempatan sama memajukan kesejahteraan mereka melalui langkah-langkah yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan penduduk, khususnya kesehatan ibu dan anak; memperluas akses pendidikan, khususnya pendidikan dasar untuk semua; dan memerangi penyebaran HIV/AIDS serta penyakit menular. Meskipun SDGs adalah komitmen dunia, SDGs disesuaikan dengan budaya dan keadaan unik tiap negara untuk membuat kemajuan ke arah yang lebih sesuai.

Penghapusan semua bentuk kemiskinan di seluruh dunia adalah prioritas nomor satu SDGs. Setiap orang yang berkepentingan untuk mencapai nol kemiskinan pada tahun 2030 bekerja keras untuk menjalankan berbagai kebijakan, inisiatif, dan

aktivitas. Selama 15 tahun ke depan, seluruh pemangku kepentingan harus bekerja untuk mencapai sejumlah tujuan terkait pengentasan kemiskinan. Di antaranya adalah memperbaiki kebijakan dan memobilisasi sumber daya yang beragam, menerapkan perlindungan sosial, menyediakan layanan dasar, mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana, dan sebagainya.

Untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat adalah tujuan utama pembangunan nasional, sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945. Karena pengurangan puing-puing merupakan agenda global dan termasuk dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), maka prioritasnya adalah semua pihak dan pemangku kepentingan terkait di tingkat internasional, nasional, dan lokal.

Sementara isu kemiskinan dibahas dalam SDG pertama, “Tanpa Kemiskinan”, proses penyatuan aspek-aspek SDGs nampaknya akan lebih inklusif dengan mengikutsertakan lembaga pemerintah, termasuk TKPK, untuk mengatasi masalah kemiskinan. Secara lebih spesifik, penelitian Zaki Arianto (2017) menunjukkan bahwa poin-poin SDGs memiliki kesamaan dalam hal pembangunan ekonomi, manusia, ekologi, dan konservasi yang menunjukkan bahwa kedua ide atau metode tersebut dapat direkonsiliasi.

## **1.8 Definisi Konseptual**

Untuk lebih memahami masalah penelitian dan menghindari kesalahpahaman, penulis memaparkan beberapa batas penilaian dan fokus penelitian dengan mendefinisikan istilah dibawah ini:

### **1.8.1 Strategi**

Penggunaan strategi sebagai alat memenuhi tujuan seseorang. Rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan disebut strategi. Strategi untuk mencapai tujuan terdiri dari langkah-langkah terpenting yang perlu diambil.

### **1.8.2 Kebijakan Publik**

Kebijakan merupakan serangkaian tindakan direkomendasikan individu, organisasi atau pemerintah di bidang khusus yang memberikan peluang dan hambatan untuk menggunakan dan mengatasi kebijakan yang direkomendasikan untuk mencapai tujuan atau sasaran.

### **1.8.3 Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan situasi yang dicerminkan sebagai minimnya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, yang berdampak kesulitan, kesusahan ataupun kekurangan pada tiap fase kehidupan.

### **1.8.4 *Sustainable Development Goals***

SDGs mengakomodasi masalah-masalah pembangunan secara lebih komprehensif baik kualitatif maupun kuantitatif menargetkan penyelesaian tuntas terhadap setiap tujuan dan sarannya

## 1.9 Definisi Operasional

Tabel 1.1 Definisi Operasional

Tujuan	Variabel	Indikator
Untuk Mengetahui Bagaimana Strategi Tim Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Riau Dalam Mewujudkan <i>Sustainable Development Goals : No Poverty (SDGs-1)</i>	Strategi Organisasi	a. Perumusan strategi melalui visi dan misi b. Perumusan visi dan misi ke dalam suatu program atau kegiatan
	Strategi Program	a. Fokus keterlibatan strategi b. Aspek-aspek yang meliputi strategi program
	Strategi Pendukung Sumber Daya	a. Pemanfaatan sarana dan prasarana b. Pemanfaatan sumber daya manusia c. Pemanfaatan sumber daya finansial”
	Strategi Kelembagaan	a. Penguatan strategi lembaga dalam menghadapi permasalahan b. Pemanfaatan unsur kelembagaan berupa standar operasional prosedur (SOP)
	SDGs-1	<i>No Poverty</i>

## **1.10 Metodologi Penelitian**

### **1.10.1 Jenis Penelitian**

Penulis penelitian ini memakai teknik penelitian deskriptif yang dipadukan pendekatan kualitatif. Jadi, data yang disatukan lebih terukur. Karena penelitian dilakukan dalam setting yang alami, pendekatan penelitian deskriptif-kualitatif terkadang disebut sebagai metode naturalistik.

Nasution mengklaim bahwa peneliti kualitatif seringkali melakukan kerja lapangan sendiri untuk mendapatkan data. Dalam metode ini, peneliti mengambil tindakan sendiri dengan melakukan perjalanan ke lokasi yang diminati dan melakukan wawancara dan/atau observasi lapangan sendiri. (Prastowo, 2010: 15).

Menurut Satori dan Komariah (2011:25) ketika dilakukan dengan benar, penelitian kualitatif secara akurat menggambarkan realitas melalui penggunaan kata-kata yang berasal dari pengumpulan data dan metode analisis yang diterapkan pada dunia nyata.

Peneliti yang melakukan penelitian kualitatif melakukannya karena tertarik untuk mempelajari fenomena yang tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan data numerik. Ini termasuk urutan kejadian selama penyelesaian tugas, perumusan konsep, pemahaman berbagai konsep, esensi produk dan layanan, dan sebagainya.

Sebagai peneliti ilmu pemerintahan khususnya politic economi dengan pendekatan kualitatif, analisis data yang dilakukan tanpa menggunakan statistik namun dengan rumus 5W + 1H (Who, What, When, Where Why dan How). Istilah what yang digunakan dalam pencarian informasi dan fakta yang merupakan hasil penelitian, how memahami cara kerja pengolahan data, khususnya untuk who yang digunakan untuk menilai siapa yang mampu dimanfaatkan dalam penelitian sebagai informan, where memeriksa sumber informasi penelitian dapat digali atau ditemukan, dan when harus mencari tahu kapan sumber informasi tersebut dapat dieksplorasi, dan poin terpenting dalam melihat analisis penelitian kualitatif yaitu why harus menganalisis lebih dalam atau menemukan lebih dalam tentang yang tersembunyi dalam fakta yang terjadi dan data penelitian yang ada, kenapa bisa terjadi seperti itu. (Ardianto, 2010: 58)

### **1.10.2 Metode Penelitian**

Menemukan, mengumpulkan, atau menyimpan data, baik sebagai data primer maupun sebagai data sekunder, untuk penulisan artikel ilmiah dan kemudian menganalisis unsur-unsur yang berhubungan dengan pokok bahasan guna menggali informasi yang paling relevan dari data yang diberikan itulah yang oleh peneliti disebut dengan Metodologi Penelitian. (Object and Research Methods n.d.p.31) Menurut Sugiyono (2010, p. 2), metode penelitian pada dasarnya menjelaskan suatu cara ilmiah dalam memperoleh informasi untuk tujuan dan kegunaan tertentu.

Metode penelitian yang penulis gunakan mengenai Strategi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Riau Untuk Mewujudkan SDGs-1 adalah metode penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian yang bertujuan mengkarakterisasi suatu gejala atau peristiwa yang terjadi dikenal dengan penelitian deskriptif kualitatif. Penekanan penelitian deskriptif adalah pada isu-isu aktual yang nyata pada saat penelitian dilakukan. Dalam penelitian deskriptif, upaya dilakukan untuk menggambarkan aktivitas dan kejadian yang menjadi titik fokus perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus. (Noor, 2011:34)

Menurut Sator dan Komariah (2011:8) Penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu fase kerja di mana suatu objek, penjelasan tentang segala jenis fenomena atau latar sosial. Artinya informasi yang dikumpulkan tidak berbentuk angka, melainkan berupa kata-kata dan gambar. Deskripsi lengkap akan mencakup perincian tentang apa, mengapa, dan bagaimana peristiwa itu terjadi.

Metode kualitatif deskriptif menekankan pada pengamatan dan disposisi ilmiah secara keseluruhan (latar alam). Para peneliti melakukan perjalanan langsung ke lokasi masalah, di mana mereka berperan sebagai pengamat, mencari gejala, dan menuliskan temuan mereka di buku observasi. (Ardianto, 2010:60).

### **1.10.3 Unit Analisis Data**

Unit Analisis adalah satuan yang diteliti yang berkaitan dengan benda, individu, kelompok, sebagai subjek penelitian (Hamidi, 2005: 75-76). Unit analisis dapat menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian. Pada suatu penelitian, menentukan suatu unit analisis sangat diperlukan. Dalam penelitian ini, unit analisis yang digunakan ialah TKPKD Provinsi Riau.

## **1.11 Teknik Pengumpulan Data**

### **1.11.1 Data Primer**

Data primer penelitian ini diaplikasikan melalui cara wawancara dengan pihak internal TKPK yang berada di kantor Bappedalitbang Provinsi Riau.

#### **i. Wawancara**

Wawancara dilakukan secara tatap muka adalah teknik untuk mengumpulkan data yang melibatkan mengajukan pertanyaan kepada informan. (Prastowo, 2010:145). Teknik wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara berstruktur. Wawancara berstruktur yaitu “wawancara dengan sejumlah pertanyaan yang telah disusun secara lebih berstruktur berdasarkan apa yang telah didapatkan dari responden yang dilakukan setelah peneliti memperoleh keterangan”. (Prastowo, 2010: 155).

Sedangkan dalam pandangan Sugiyono, Ketika peneliti atau pengumpul data memiliki gagasan yang jelas tentang jenis informasi yang perlu dikumpulkan, ia dapat menggunakan pendekatan wawancara terstruktur. Data dikumpulkan melalui serangkaian wawancara dimana setiap responden ditanyai serangkaian pertanyaan yang identic (Prastowo, 2010:155).

Tabel 1.2 Narasumber

NARASUMBER	POSISI
Khofifudin	Bappedalitbang
Ari	Bappedalitbang
Drs. H. Supriyadi, M.Si.	Dinas Sosial
Dr. H. Kamsol	Dinas Pendidikan
Nini Sasnidawati, SKM	Dinas Kesehatan

Narasumber yang terpilih adalah orang orang yang memiliki kepentingan di TKPK untuk menghasilkan data dan informasi yang akurat peneliti akan menetapkan beberapa kriteria tertentu terhadap informan penelitian. Pemilihan informan dengan teknik *purposive sampling*. Dengan membuat perbedaan spesifik yang sejalan dengan tujuan penelitian, peneliti dapat menggunakan pendekatan ini untuk menentukan sampel agar dapat menjawab pertanyaan penelitian. Berikut persyaratan informan penelitian:

- a) Pejabat/staf berkompeten yang menangani bidang kemiskinan;
- b) Pejabat/staf yang pernah terlibat dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs Provinsi Riau
- c) Pernah/sedang terlibat dalam menangani penyusunan dokumen perencanaan;

d) Ditempatkan/bekerja pada bidang perencanaan sekurang-kurang terhitung tahun 2020-2022.

**ii. Waktu dan Lokasi Wawancara**

Kegiatan wawancara dilakukan oleh penulis selama kurang lebih dua bulan, pada hari dan jam kerja. Wawancara dilaksanakan langsung di tempat, untuk pihak internal penulis melakukan wawancara di Sekretariat TKPK Provinsi Riau, Bappeda Provinsi Riau. Jl. Gajah Mada No. 200 Pekanbaru, Riau, Indonesia. Kegiatan wawancara dilakukan penulis dengan mengajukan beberapa pertanyaan seputar TKPK.

**1.11.2 Data Sekunder**

Data sekunder digunakan hanya sebagai referensi data untuk mendukung penelitian. Data sekunder berikut dimasukkan dalam penelitian ini:

**i. Dokumentasi**

Peristiwa masa lalu dicatat melalui dokumen, yang dapat ditulis atau difilmkan. (Prastowo, 2010: 191). Dalam penelitian ini dokumen digunakan sebagai sumber data penelitian yang berfungsi untuk bukti dari penelitian pengumpulan data dan bahan deskriptif yang berlaku untuk mendorong keaslian data yang terkumpul.

Menurut Guba dan Lincoln penggunaan dokumen untuk penelitian itu dikarenakan beberapa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, diantaranya adalah (Prastowo, 2010: 193):

- a) Dokumen diandalkan karena memberikan informasi yang konsisten.
- b) Bermanfaat untuk membangun kredibilitas sebagai bukti.
- c) Karena sifatnya yang melekat dan sesuai dengan konteksnya, dokumen sesuai dan berharga untuk penelitian kualitatif.

Dokumentasi di sediakan dalam format:

- a) Website pemerintah
- b) Foto-foto/gambar-gambar pendukung
- c) Dokumen-dokumen pendukung (LP2KD, RPKD, LKJiP, Aset)

## **ii. Kepustakaan**

Tujuan dilakukannya penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan data relevan dengan topik penelitian. Penulis penelitian ini menggunakan sumber kepustakaan dengan cara membaca, mengumpulkan data, mendokumentasikan, dan menelaah buku dan jurnal yang berkaitan penelitian yang dikaitkan dengan isu atau masalah yang menjadi fokus penelitian.

### **1.12 Teknik Analisis Data**

Data yang dapat diartikan adalah apa yang dikumpulkan analisis ketika melakukan analisis. Mengumpulkan adalah mengaturnya dalam sistem klasifikasi berdasarkan kesamaan atau tema. Tindakan menafsirkan memerlukan pemberian signifikansi pada hasil analisis, menjelaskan pola atau kategori, dan mengidentifikasi hubungan antara ide-ide. (Ardianto, 2010:215)

Menurut Nasution (Ardianto, 2010:216), disarankan untuk mulai menganalisis data dalam penelitian kualitatif sejak awal. Data yang diperoleh di lapangan perlu segera dicatat dan dianalisis. Metode yang disarankan adalah mengikuti langkah-langkah berikut:

- a. Mereduksi data adalah proses meringkas dan memilih isu-isu yang paling penting dan memfokuskan pada isu-isu yang penting untuk sampai pada kesimpulan akhir.
- b. Men-*display* data, setelah mereduksi data langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Hal ini dapat mempermudah peneliti dalam menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan detail. Bentuk data yang paling sering digunakan adalah teks naratif.
- c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan dan verifikasi. Dimulai dari proses pengumpulan data, mencari pola, tema dan seluruh data yang diperoleh dari awal, maka penulis akan mencoba mengambil kesimpulan. Setelah itu kesimpulan yang ada harus diverifikasi agar lebih menjamin validitas yang ada.